

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan industri kecil sangat penting dan memerlukan landasan pijak yang kokoh (Basri, 2003). Selain itu, mayoritas industri kecil sebetulnya adalah usaha rumah tangga - mikro, sedangkan yang berukuran menengah relatif sangat tipis atau keropos di tengah (*hollow middle*). Usaha menengah bisa dikatakan terjepit di antara dominasi usaha kecil - mikro namun kontribusinya atas PDB sangat rendah dan di sisi lain usaha besar yang jumlahnya sedikit tapi kontribusinya terhadap PDB sangatlah dominan (Setiana, 2001). Oleh karena itu, akses kesempatan harus dibuka seluasnya tanpa diskriminasi (Agustina, 1993). Terkait hal ini, maka peran dan keberadaan sejenis *trading house* atau *business development center* khusus untuk IKM misalnya sangat membantu untuk mewujudkan daya saing industri kecil (Samosir, 2000).

Pemberdayaan IKM – industri kecil atau lebih populer dengan pemberdayaan ekonomi rakyat pada dasarnya merupakan manifestasi tuntutan pembangunan ekonomi (Dillon dan Hermanto, 1993). Industrialisasi bukan menciptakan konglomerasi yang menekan industri kecil - industri rumah tangga, bukan pula dengan menciptakan industri besar lewat pemberian proteksi yang menyengsarakan usaha kecil – konsumen (Ayyagari, 2003). Intinya pemberdayaan ekonomi rakyat harus terwujud dalam dua sisi: pertama, perluasan basis aktor-aktor ekonomi dalam proses produksi dan yang kedua: penegakan kedaulatan konsumen. Orientasi keduanya akan mereduksi kemiskinan dan menekan jumlah pengangguran (Gradstein, 2003).

Pengangguran adalah keadaan terkendalanya pemenuhan hak atas kesejahteraan dan hak atas pekerjaan. Pemerintah diyakini tidak mampu mengatasi pengangguran (Soetrisno, 2003). Di sisi lain, masyarakat berusaha mengatasi krisis dan juga bertahan dengan mengembangkan sektor informal dan IKM yang padat tenaga kerja (Glendoh, 2001). Solusi untuk mengatasi pengangguran adalah melakukan review atas kebijakan ekonomi dan kembali ke sektor pertanian, kelautan, IKM - informal dan tidak hanya mengejar pertumbuhan semata (Herwidayatmo, 2002). Pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya, menjadi beban masyarakat, sumber utama kemiskinan dan mendorong keresahan sosial dan bisa menghambat pembangunan (Khandker, 1996). Oleh karena itu, perlu ada kebijakan mendukung sektor informal dan IKM secara sistematis, komprehensif dan berkelanjutan (Prawirokusumo, 2003).

Tidak dapat dipungkiri hampir semua usaha ekonomi sektor-sektor tersebut berbasis pada inisiatif rakyat. Mereka menjadi simbol dan identitas dari sektor riil UKM, yang kemudian menjadi motor penggerak kehidupan masyarakat lapis bawah. Oleh karena itu, penanganan dan pemberdayaan industri kecil, terutama di sentra-sentra industri termasuk juga di sentra industri emping melinjo di Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Jogja memang harus mampu memberi stimulus bagi perbaikan kinerja sektor riil agar

pertumbuhan tetap terjadi dan laju penyerapan tenaga kerja bisa lebih optimal sehingga meminimalisasi kasus lonjakan pengangguran.

B. Perumusan Masalah

Mengacu peran penting industri kecil terhadap penyerapan tenaga kerja dan mereduksi kemiskinan, peningkatan pendapatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat lokal, maka harus ada tuntutan bagi pemerintah dan juga semua pihak untuk meningkatkan kepeduliannya bagi pengembangan industri kecil secara sistematis dan berkelanjutan (*Berry, et.al., 2001*). Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini:

1. Bagaimana kinerja dari industri kecil di sentra industri emping melinjo di Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, terutama dikaitkan dengan aspek kuantitas dan aspek kualitas ditengah kondisi persaingan usaha yang kian ketat dan iklim ekonomi yang kurang kondusif di masa krisis dan pasca bencana gempa?
2. Bagaimana kontribusi keberadaan industri kecil, terutama dari kasus di sentra industri emping melinjo di Kec. Banguntapan, Kab. Bantul terkait aspek perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran?
3. Bagaimana kontribusi industri kecil, terutama untuk kasus sentra industri emping melinjo di Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, terkait pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal berbasis industri berbahan baku lokal?
4. Bagaimana kontribusi dari keberadaan industri kecil, terutama untuk kasus sentra industri emping melinjo di Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, terutama dari aspek peningkatan pendapatan keluarga - masyarakat setempat pasca gempa?
5. Bagaimana kontribusi keberadaan industri kecil, terutama dari kasus sentra industri emping melinjo di Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, dalam peningkatan pendapatan asli daerah bagi Kabupaten Bantul terkait implementasi otonomi daerah?